

# LAPORAN TAHUNAN

## FEDERASI SERIKAT PEKKA

### Tahun 2021

#### I. Latar Belakang Federasi Serikat Pekka Indonesia

Federasi Serikat Pekka merupakan kepengurusan Serikat Pekka yang berkedudukan di tingkat nasional untuk mewakili gerakan suara-suara Serikat Pekka wilayah yang berada di 62 Kabupaten/Kota di 20 provinsi. Strategi Pengorganisasian Pekka untuk menguatkan Serikat Pekka di akar rumput sebagai pondasi mereka memulai menjadi Serikat. Pengorganisasian di akar rumput dalam bentuk kelompok-kelompok Pekka. Kelompok Pekka mulai terbentuk pada tahun 2002 yang berstatus janda. Karena peran sebagai kepala keluarga bukan hanya janda, maka keanggotaan berkembang, yaitu (berdasarkan ART Serikat Pekka):

1. Perempuan yang suaminya meninggal
2. Perempuan yang bercerai
3. Perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan/atau keluarganya
4. Perempuan yang ditelantarkan oleh suami
5. Perempuan yang suaminya sakit menahun
6. Perempuan bersuami yang menjadi pencari nafkah utama dan menyatakan diri sebagai kepala keluarga
7. Perempuan bersuami namun suaminya merantau mencari nafkah di luar daerah
8. Perempuan bersuami yang ingin berkontribusi dalam Serikat Pekka

Pada tahun 2008 terbentuk Serikat Pekka di 8 provinsi (Aceh, NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara).

Pada tahun 2009 Serikat Pekka 8 provinsi ini bersepakat membentuk Federasi Serikat Pekka. Berjalannya waktu pada tahun 2012 serikat pekka memperluas dengan pengembangan dan membentuk Serikat Pekka di 9 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara).

Pada tahun 2013 Serikat Pekka melaksanakan Forum Nasional yang ke 3 di Hotel Grand Cempaka dan sekaligus mendeklarasikan Federasi Serikat Pekka Nasional dengan dihadiri perwakilan pengurus-pengurus Serikat Pekka dari 17 provinsi dan disaksikan oleh pemerintah, dinas-dinas terkait, lembaga- lembaga dan organisasi yang menjadi mitra Pekka. Pada kegiatan itu terpilih dan dilantik kepengurusan Federasi Serikat Pekka nasional dengan masa jabatan 3 tahun periode 2013 - 2016.

Pada tahun 2016 terbentuknya Serikat Pekka Bali dengan melahirkan 2 Serikat Pekka Kabupaten yaitu Buleleng dan Gianyar.

Desember 2016 Serikat Pekka melakukan musyawarah nasional di Hotel Santika Harapan Indah Bekasi untuk pemilihan kepengurusan Federasi Serikat Pekka yang baru untuk periode 2016 - 2021 dan terpilih 3 pengurus, 3 pengawas 7 wali amanah.

Mei 2018 Serikat Pekka melakukan Munaslub (musyawarah nasional luar biasa) dan terpilih pengurus Federasi Serikat Pekka Indonesia. Agustus 2018 ketiga pengurus federasi Serikat Pekka Indonesia mulai melaksanakan tugasnya di tingkat nasional karena mereka berkantor di Sekretariat.

Desember 2019 Munaslub dilakukan karena bendahara mengundurkan diri maka dilengkapi kepengurusan inti Federasi Serikat Pekka.

Maret 2021 Federasi mengadakan Munaslub dengan agenda Perubahan AD/ART dan pengukuhan struktur baru yang mengacu pada AD/ART tanpa mengubah personil. Perubahan AD/ART tersebut mencakup:

1. Semula ada Wali Amanah menjadi koordinator Wilayah yang terdiri dari:

- a) Sumatera
- b) Jawa
- c) Bali
- d) Nusa Tenggara
- e) Kalimantan
- f) Sulawesi
- g) Maluku Utara

2. Jabatan Sekretaris berubah menjadi Sekretaris Eksekutif yang memiliki kewenangan memimpin Badan Pelaksana Harian untuk menjalankan tugas harian Federasi

3. AD/ART Serikat berlaku sama secara nasional mengacu AD/ART Federasi:

- a) Logo
- b) Bendera
- c) Struktur Kepengurusan Serikat sudah tidak ada Wali Amanah dan tidak ada Divisi-divisi, diganti menjadi Koordinator Wilayah
- d) Tidak ada istilah anggota biasa dan luar biasa

## II. Visi dan Misi

Visi Federasi Serikat Pekka adalah memperjuangkan martabat dan kedaulatan Pekka secara ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera dan adil jender.

Misi Federasi Serikat Pekka meliputi:

- Membela hak-hak perempuan khususnya perempuan kepala keluarga dan kelompok marginal
- Menyelenggarakan pendidikan kritis untuk penyadaran hak sosial, ekonomi dan politik perempuan
- Meningkatkan kapasitas perempuan khususnya perempuan kepala keluarga untuk mengatasi persoalan kehidupan
- Mengembangkan organisasi dan jaringan kerjasama
- Melakukan advokasi kebijakan dan mengkampanyekan perubahan nilai-nilai yang lebih adil jender